

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya perekonomian suatu negara berbanding lurus dengan kecurangan yang terjadi pada suatu negara. Untuk mengurangi terjadinya kecurangan itu maka perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bersedia melaporkan jika mengetahui adanya tindakan yang merugikan berbagai pihak. Sama halnya dengan organisasi pemerintahan di Indonesia yang masih sering terjadi kecurangan salah satunya adalah korupsi.

Tindakan korupsi selalu merugikan berbagai pihak, baik bagi suatu organisasi maupun perorangan. Oleh karena itu tindak korupsi harus di berantas agar tidak menimbulkan bibit-bibit baru yang semakin besar untuk melakukan kecurangan. Harus ada upaya untuk memberantas korupsi, salah satunya dengan mendeteksi terlebih dahulu menggunakan alat yang efektif yaitu dengan tindakan *whistleblowing*.

Bouville (2007) mengatakan *whistleblowing* adalah salah satu cara untuk memberantas tindakan korupsi yang sering terjadi di suatu organisasi atau negara. Orang yang melaporkan suatu kecurangan atau korupsi yang terjadi pada sebuah organisasi disebut dengan *whistleblower*. Pengembangan *whistleblowing* di Indonesia hadir dengan diterbitkannya Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang digunakan perusahaan dalam mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran secara manual. Aturan implisit tersirat dalam UU No. 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban dan selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun anonim 9,1% pelanggaran (ACFE Indonesia, 2016).

Fenomena pengungkapan kecurangan di Lampung adalah adanya kecurangan dalam pengerjaan proyek peningkatan, pelebaran, dan pemeliharaan Jalan Sentot Alibasya, ruas jalan KH Agus Anang, jalan Soekarno Hatta tahun anggaran 2014. Nilai proyek tersebut mencapai Rp 5,2 miliar, namun penyidik

berhasil menemukan adanya kekurangan volume, sehingga merugikan negara sebesar Rp 800 juta. (www.tribunnews.com). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan BPKP terdapat fenomena yang terjadi yaitu adanya temuan yang memiliki unsur tindak korupsi senilai Rp 59,8 triliun. Dalam periode 2003-2014 BPK menemukan 442 temuan unsur tindak korupsi senilai Rp 43,8 triliun. Sementara dalam periode 2011-2015 sebanyak 3.072 audit investigatif BPKP dengan unsur tindak korupsi senilai Rp 16 triliun. (www.cnnindonesia.com).

Fenomena *whistleblowing* lainnya yaitu salah satu auditor BPK pada tahun 2005 menjadi *whistleblower* dalam kasus penyuapan yang melibatkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisioner KPU menyuap auditor yang memeriksa pengadaan kotak suara. Tindakan tindak pidana korupsi diduga terjadi dalam pengadaan kotak suara tersebut. Ketika auditor melaporkan penyuapan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), auditor tersebut dilaporkan terlibat dalam kasus korupsi di Kementerian Agama (KPK 2007). m.liputan6.com.

Anggota divisi investigasi ICW Wana Alamsyah mengatakan terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester tahun 2020. Dari 169 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, 139 kasus diantaranya merupakan kasus korupsi baru. Kemudian 23 pengembangan kasus serta 23 operasi tangkap tangan (OTT). Tersangka yang ditetapkan ada 372 orang dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 18,1 triliun. (www.kompas.com)

Whistleblowing merupakan cara yang tepat untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran-pelanggaran akuntansi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat seseorang menjadi *whistleblower*. Faktor tersebut antara lain:

Gerungan (2004) mengatakan bahwa sikap merupakan suatu reaksi pandangan atau perasaan seorang individu terhadap suatu objek. Walaupun objeknya sama, namun tidak semua individu mempunyai sikap yang sama, hal itu dapat dipengaruhi oleh keadaan individu, pengalaman, informasi, dan

kebutuhan masing-masing individu berbeda (Cheisviyanny & Arza, 2019). Sikap seseorang terhadap objek akan membentuk perilaku individu terhadap objek. Sikap terhadap perilaku menurut Davis *et al* (dalam Jogiyanto, 2007) didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Menurut Ajzen (1991) mendefinisikan sikap sebagai derajat individu untuk mengevaluasi dan menilai sesuatu yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.

Sikap seorang karyawan terhadap *whistleblowing* akan mempengaruhi minat karyawan tersebut untuk melakukan *whistleblowing*. Menurut Park dan Blenkinsopp (2009), sikap terhadap *whistleblowing* mengenai sejauh mana individu memiliki evaluasi menguntungkan atau tidak menguntungkan dari *whistleblowing* akan jumlah keyakinan yang dimiliki karyawan tentang konsekuensi dari *whistleblowing* dan evaluasi subjektif terhadap konsekuensi tersebut. Menurut *theory of planned behaviour* (TPB), sikap adalah salah satu variabel yang mempengaruhi minat perilaku seseorang.

Personal cost of reporting merupakan pandangan pegawai terhadap resiko pembalasan/balas dendam atau sanksi dari anggota organisasi, yang dapat mengurangi minat pegawai untuk melakukan *whistleblowing* (Bagustianti, 2014). *Personal cost of reporting* dapat berupa tindakan seperti melemahkan proses pengaduan, pengucilan, dan diskriminasi terhadap *whistleblower*. Menurut Crust (2006) ancaman merupakan pembalasan yang mungkin akan diterima oleh pegawai jika mengungkapkan kecurangan yang ada di organisasi dapat berupa mutasi kebagian yang lain yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan mendapatkan penilaian kinerja yang tidak adil.

Menurut Winardi (2013) tingkat keseriusan kecurangan menjadi faktor penting dalam munculnya tindakan *whistleblowing*. Organisasi akan terkena dampak kerugian yang lebih besar dari *wrongdoing*/kecurangan yang lebih serius dibandingkan dari *wrongdoing*/kecurangan yang kurang serius. Tingkat keseriusan kecurangan dapat dilihat dari seberapa besar *impact* yang disebabkan oleh kecurangan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat keseriusan kecurangan akan menentukan apakah perlu dilakukan

whistleblowing atau tidaknya. Ketika kecurangan yang terjadi sudah sangat merugikan organisasi maka tindakan *whistleblowing* akan dilakukan untuk menyelamatkan kerugian dari kecurangan tersebut. Akan tetapi jika kecurangan masih dalam tahap dapat ditolerir maka *whistleblowing* akan mungkin tidak terjadi atau pelaporan kecurangan masih skala rendah.

Mowday, dkk (1979) mengatakan bahwa komitmen organisasi sebagai kekuatan relatif identifikasi dan keterlibatan individu dalam organisasi tertentu yang dapat ditandai dengan tiga faktor terkait yaitu: pertama, keyakinan yang kuat dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Kedua, kesediaan untuk mengorbankan usaha yang cukup atas nama organisasi. Dan yang terakhir keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi (loyalitas).

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun masih perlu dilakukan pengujian ulang terhadap penelitian tersebut dikarenakan masih memiliki hasil penelitian yang berbeda. Seperti pada penelitian Alwi&Helmayunita (2020) yang menyatakan bahwa sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pegawai dalam melakukan *whistleblowing*, sedangkan menurut penelitian Syafira (2020), Sari (2018), dan Bagustianto (2015) menunjukkan bahwa sikap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat pegawai dalam melakukan *whistleblowing*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Alwi & Helmayunita (2020) yang meneliti tentang Pengaruh Sikap, *Personal Cost of Reporting*, dan Tingkat Keseriusan Kecurangan Terhadap *Intention Whistleblowing* Pada Pemerintah Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pertama penelitian ini menambahkan variabel Komitmen Organisasi yang mereplikasi dari penelitian Busra, dkk (2019) Pengaruh Tingkat Keseriusan Kecurangan *Personal Cost*, dan Komitmen Organisasi, Terhadap Kecenderungan Melakukan *Whistleblowing* dengan alasan penilaian komitmen yang kuat dalam organisasi dapat mempengaruhi minat seseorang untuk menjadi *whistleblower*. Komitmen organisasi mampu memberikan prediksi mengenai seberapa dampak yang ditimbulkan oleh seseorang ketika

melakukan kecurangan. Kedua, penelitian terdahulu mengambil objek pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan pada penelitian ini penulis mengambil objek yaitu Auditor pada BPKP di Bandar Lampung. Berdasarkan penjelasan yang telah di sampaikan maka peneliti bermaksud untuk mengajukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sikap, *Personal Cost of Reporting*, Tingkat Keseriusan Kecurangan Dan Komitmen Organisasi Terhadap *Intention Whistleblowing*”

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah dan hasilnya tidak bias sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah :

1.2.1 Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini auditor BPKP di Bandar Lampung.

1.2.2 Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini sikap, *personal cost of reporting*, keseriusan kecurangan, dan komitmen terhadap *intention whistleblowing*.

1.2.3 Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPKP di Bandar Lampung.

1.2.4 Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April hingga Juni

1.2.5 Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Ruang lingkup ilmu penelitian yaitu auditing.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap *intention whistleblowing*?
2. Apakah *personal cost of reporting* berpengaruh terhadap *intention whistleblowing*?

3. Apakah tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap *intention whistleblowing*?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap *intention whistleblowing*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Sikap terhadap *Whistleblowing*.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Personal cost of reporting* terhadap *Whistleblowing*.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh tingkat keseriusan kecurangan terhadap *Whistleblowing*.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Komitmen Organisasi terhadap *Whistleblowing*.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu dan mengembangkan wawasan peneliti dalam bidang bidang akuntansi publik.
2. Bagi pihak instansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan masukan bagi karyawan dalam meningkatkan kinerja dan dapat bekerja lebih profesional.
3. Bagi pihak akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran serta pengaplikasian ilmu pengetahuan, terutama berhubungan dengan *intention whistleblowing*.

4. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi tambahan untuk pengembangan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya, dan sebagai bahan pertimbangan perusahaan atau instansi lain yang menghadapi permasalahan yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Penelitian ini diawali dengan penjelasan tentang latar belakang masalah yang menjadi pemicu munculnya permasalahan. Dengan latar belakang masalah tersebut ditentukan rumusan masalah yang lebih terperinci sebagai acuan untuk menentukan hipotesis. Dalam bab ini pula dijabarkan tentang tujuan dan manfaat penelitian, dan pada akhir bab dijelaskan tentang sistematika penelitian yang akan digunakan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat untuk hipotesis yang akan diajukan, kemudian diuraikan pula penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan hipotesis yang akan diajukan. Pada bab ini juga akan dijabarkan tentang kerangka pemikiran dan hipotesis dari permasalahan yang ada.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdapat penjelasan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, dijabarkan pula populasi dan sampel yang digunakan, jenis variabel penelitian, definisi operasional variabel dan metode analisis yang digunakan untuk mengolah data yang sudah dikumpulkan dari objek penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang data-data penelitian, analisis, serta hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan keseluruhan hasil penelitian serta saran yang ditujukan untuk semua pihak yang